

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sejak 1997 hingga 2018 dipicu kelalaian pemerintah. Pemerintah dinilai lamban dalam melakukan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat menjadi korban. Masyarakat menuntut tergugat atas perbuatan melawan hukum yang merugikan warga negara. Pemerintah selaku tergugat terus melakukan upaya hukum sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/Pdt/2018 pada pokoknya menolak kasasi dari Negara Republik Indonesia, menguatkan putusan *judex facti*. Bertindak sebagai benteng terakhir keadilan, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemerintah. Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Palangkaraya Kalimantan Tengah, Karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan dalam pelaksanaan ganti rugi. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan ganti rugi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik pada analisis penelitian peraturan perundang – undangan mengenai Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Akibat Kebakaran Hutan dengan bahan pustaka. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang dilakukan melalui cara yang berasal dari bahan hukum primer kemudian data tersebut disusun dan dianalisa melalui metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini penindakan hukum bagi pihak tergugat masih lemah. Kendati sudah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung, Pemerintah belum menjalankan putusan tersebut. Pemerintah dinilai belum sepenuhnya menjalankan putusan kasasi yaitu memenuhi dan melaksanakan kewajiban menjalankan putusan. dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi warga negaranya, sehingga wajib segera menanggulangi, menghentikan serta melaksanakan putusan ganti rugi akibat kebakaran hutan tersebut.

ABSTRACT

*Forest and land fires that occurred from 1997 to 2018 were triggered by government negligence. The government is considered to be slow in anticipating the spread of forest and land fires as well as a lack of coordination between the central government and regional governments so that people become victims. The community sued the defendant for illegal actions that harmed citizens. The government as the defendant continues to make legal efforts until the appeal is made in the Supreme Court. The decision of the Supreme Court Number 3555 K / Pdt / 2018 in essence rejected the cassation from the Republic of Indonesia, strengthening the *judex facti* decision. Acting as the last bastion of justice, the Supreme Court rejected the government's appeal. The author intends to examine more deeply about the implementation of compensation due to forest fires in the Palangkaraya area of Central Kalimantan, because as far as the author's knowledge there is no discussion in the implementation of compensation. Based on this description, the author is interested in examining the implementation of the compensation.*

This research uses a normative juridical approach which focuses on the analysis of research on legislation regarding the implementation of compensation due to forest fires using library materials. The stages taken in compiling this research are using the library research method. The data is collected using primary legal materials and then the data is compiled and analyzed using descriptive analytical methods.

The results of this study indicate that so far the legal action for the defendant is still weak. Even though the Supreme Court has declared guilty, the Government has not implemented this decision. The government is considered not to have fully implemented the cassation decision, namely fulfilling and carrying out the obligation to carry out the decision. It can be concluded that the government has an obligation to protect its citizens, so that it is obliged to immediately cope with, stop and implement compensation decisions due to forest fires.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan selama ini sehingga penulis mempunyai kemampuan dan ketentuan untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN “**

Penulis dengan rendah hati ingin menghaturkan rasa terima kasih sedalam – dalamnya kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat kepada penulis selama penyusunan tugas akhir .

Penulis dengan penuh kerendahan hati juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H. R. AR. Harry Anwar , S.H , M. H , selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung ;
2. Wakil Rektor I , II Universitas Langlangbuana Bandung ;

3. Ibu DR. Hernawati Ras ,S.H, Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
4. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H, M.H , selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H , M.H , selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
6. Bapak Dani Durrahman, S,H , M.H , selaku Wakil Dekan III serta Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
7. Ibu Dini Ramdania ,S.H , M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
8. Bapak Rachmat Suharno,S.H,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
9. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, SH, M.H, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
10. Para dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
11. Ucapan terima kasih untuk Keluarga Besar alm Serma TNI (Purn.) Bapak Soeparno beserta Ibu Sudiyah ;

12. Ucapan terima kasih untuk Keluarga Besar alm Bapak Yayat Wakhdiat beserta Ibu Nining Suhaenih ;
13. Ucapan terima kasih untuk keluarga besar PP Dewan Kepemudaan Nasional (DKN) Provinsi Jawa Barat ;
14. Ucapan terima kasih untuk keluarga besar Gerakan Masa Depan Indonesia (GMDI) ;
15. Ucapan terima kasih untuk semua sahabat sekaligus keluarga saya, Bintang Ellita Destriani, Anggi Yulianti Suseno, Kais Mumajid, Razka Indra Dwi Rachma, Moh Ramdani, Dani Rizki Mulyana, Deni Supriatna, Fauzan nurmukhlis, Galih Dermawan, Adeyana Casmita, Rizal Yusanta ;

Secara khusus, penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada Ibunda tercinta Ira Citra Ningrum dan Ayahanda Sulimin Dirgahayu Mulyono yang telah menanamkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan demi menghadapi persaingan kehidupan ini dan ilmu pengetahuan itulah yang membawa kebahagiaan yang hakiki. Tak lupa penulis mengungkapkan rasa terima kasih terdalam bagi adik tercinta Trisna Tansia Putri Sudirgahayu yang selalu menjadi inspirasi serta kekuatan bagi penulis agar tidak pantang menyerah dalam segala hal dalam kehidupan.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum perdata. Akhirnya demi penyempurnaan tugas akhir ini, dengan tulus dan ikhlas penulis mengharapkan

kepada semua pihak yang peduli terhadap pembangunan hukum di Indonesia pada umumnya dan secara khususnya memberikan apresiasi positif serta terdorong untuk melengkapi berbagai kekurangan tugas akhir ini , semoga ikhtiar dalam tugas akhir ini di ridhoi ALLAH SWT , Aamiin .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 3 September 2020

Penulis

Luthfi Fadhil Dirgahayu